

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 bahwa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) termasuk perusahaan negara yang terbentuk perusahaan perseroan (Persero) dimana sebagian besar seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara dengan penyertaan secara langsung yang dipisahkan, Kekayaan negara tersebut berasal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan keuangan negara guna dijadikan sebagai penyertaan modal suatu negara dalam perusahaan perseroan (Persero). Dalam melakukan kegiatan usahanya BUMN akan melaksanakan kegiatan operasional oleh perusahaan perseroan (Persero) BUMN yang digunakan terhadap biaya anggaran negara yaitu untuk kebutuhan dalam melakukan tujuan sukses berjalannya suatu kegiatan perusahaan salah satunya adalah untuk biaya perjalanan dinas.

Perjalanan dinas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan terhadap negara yang berasal dari dalam pusat ataupun dari dalam daerah. Sumber dana yang akan dikeluarkan oleh APBN ataupun APBD, maka biaya yang akan dikeluarkan dapat dilakukan pencatatan atas biaya yang akan membebani dan termasuk kedalam dana APBN ataupun APBD. Perjalanan dinas juga dapat digunakan sebagai kegiatan yang sudah mendapatkan surat resmi guna dalam rangka melakukan komponen biaya penyelenggaraannya tersebut karena mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan.

Tugas pekerjaan kedinasan merupakan perintah tugas atas pekerjaan yang akan berkaitan terhadap kepentingan suatu perusahaan. Perjalanan dinas tingkat pimpinan dapat dilakukan karena berbagai suatu kepentingan dan perjalanan dinas tingkat pegawai akan dilakukan dengan kepentingan atas perintah tugas yang sudah diberikan oleh perusahaan.

Setiap perusahaan mempunyai prosedur perjalanan dinas masing-masing sesuai atas ketentuan yang sudah dibuat oleh perusahaan agar perjalanan dinas dapat untuk dilakukan dengan sangat efektif dan efisien. Dengan hal terkait adanya prosedur perjalanan dinas pada perusahaan dapat mempermudah untuk mengorganisir dalam melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, serta

pengawasan. Dimana setiap melakukan perjalanan dinas dengan prinsip apapun perusahaan akan membuat ruang lingkupnya dengan baik agar dapat dilaksanakan secara profesional agar mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Namun PT Utama Karya (Persero) belum menerapkan terkait SOP perjalanan dinas yang berlaku secara fisik. Maka dalam hal kegiatan perjalanan dinas ini dilakukan sesuai dengan SOP secara langsung oleh perusahaan. PT Utama Karya (Persero) hanya mempunyai surat keputusan direksi nomor 31/KPTS/I/2022 yang berisi tentang perjalanan dinas

Perjalanan dinas dalam negeri pada PT Utama Karya (Persero) terbagi atas dua ketentuan yaitu untuk perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas mobilisasi. Untuk dapat mencapai suatu kinerja dan hasil yang maksimal maka perusahaan akan menjalankan salah satu fungsinya sebagai salah satu tolak ukur perusahaan untuk menerima rincian biaya yang akan dikeluarkan sebagai salah satu anggaran keuangan suatu perusahaan dan hal terkait yang sudah dilakukan untuk pertanggungjawabannya dalam hal kegiatan dinas. Setelah itu perusahaan akan melakukan verifikasi dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh perusahaan, Setiap ruang lingkup perusahaan mempunyai salah satu departemen yang berfungsi dalam mengawasi kegiatan dan melakukan atas evaluasi yang ada pada lingkup internal perusahaan.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan terhadap tugas perjalanan dinas terdapat beberapa proses yang ditentukan atas ketentuan perusahaan. Ketentuan terkait perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh pelaksana SPD dalam menjalankan tugas perjalanan dinas tersebut yaitu dengan menyiapkan berbagai pengajuan dokumen serta mempertanggungjawabkan hal perintah perjalanan dinas kepada para pejabat yang berwenang.

Menurut Surat Keputusan Direksi PT Utama Karya (Persero) pada Nomor 31/KPTS/I/2022 Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pejabat, Karyawan Tetap, Karyawan Tidak Tetap yang akan dibebankan oleh Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) berupa Perjalanan dinas jabatan dan perjalanan dinas mobilisasi. Perjalanan dinas dilaksanakan melalui berbagai prinsip yaitu antara lain seperti selektif yang dimana untuk kepentingan yang tertinggi dan diprioritaskan oleh perusahaan dengan berkaitan pada penyelenggaraan perusahaan, Ketersediaan

anggaran dan kesesuaian anggaran dalam melakukan pencapaian unit kerja, Efisiensi dalam menggunakan RKAP/RKAD, serta Akuntabilitas atas pemberian pemerintah dalam melakukan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan ataupun perjalanan dinas mobilisasi.

PT Utama Karya (Persero) akan melakukan kegiatan operasionalnya dengan mempertimbangkan berbagai hal secara matang untuk membuat perusahaan mendapatkan kesuksesan. Hal tersebut dibuat dan dilakukan beberapa pihak terkait dalam masa proses kegiatan tersebut. Kegiatan operasional perusahaan memiliki pihak-pihak terkait seperti Executive Vice President (EVP) atau Senior Vice President (SVP) selaku pejabat yang berwenang berdasarkan posisi dalam satu ruang lingkup perusahaan yang memiliki kewenangan tertinggi agar dapat menjalankan kegiatan dinas sesuai ketentuan pada perusahaan yaitu PT Utama Karya (Persero) setelah itu pimpinan yang akan mengarahkan proses perjalanan dinas, sekretaris yang mendapatkan perintah pimpinan dalam melakukan pembuatan surat tugas ataupun surat perintah perjalanan dinas, serta keuangan yang akan melakukan konsep penyusunan biaya berdasarkan tingkat jabatan tertinggi hingga jabatan standar bawah dalam melakukan perjalanan dinas dan melakukan atas pembayaran pada rincian biaya yang sudah dilakukan oleh pelaksana SPD dalam menjalankan tugas dinas tersebut.

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penulis mengangkat judul “Tinjauan Atas Prosedur Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri PT Utama Karya (Persero) Divisi Perencanaan Jalan Tol”.

## **I.2 Tujuan**

Adapun tujuan dalam penyusunan laporan tugas akhir sebagai berikut :

1. Untuk meninjau atas tahapan dalam prosedur pengajuan biaya perjalanan dinas dalam negeri pada perusahaan BUMN di PT Utama Karya (Persero) Divisi Perencanaan Jalan Tol.
2. Untuk mengetahui ketentuan perihal rincian biaya yang diperlukan dan dokumen persyaratan terkait dengan perjalanan dinas.

### **I.3 Manfaat**

Sesuai atas isi penelitian laporan tugas akhir ini, maka manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Pada laporan tugas akhir ini diharapkan dapat untuk berguna dalam memperluas pemahaman serta ilmu dan pengetahuan bagi penulis dalam memahami terkait alur biaya yang akan dilakukan perusahaan dalam menjalankan atas biaya kegiatan rutin mengenai perjalanan dinas yang dilakukan oleh salah satu perusahaan BUMN.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Agar dapat untuk memahami wawasan dan pengetahuan terkait atas pengajuan biaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan perjalanan dinas dalam negeri.

- b. Bagi Pembaca

Agar dapat untuk memahami hal-hal yang diperlukan perihal perjalanan dinas seperti untuk agar mengetahui terkait atas tahapan prosedur, pengajuan rincian biaya dan persetujuan dalam melakukan perjalanan dinas di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Utama Karya (Persero) Divisi Perencanaan Jalan sesuai dengan ketentuan atas aturan yang diberlakukan oleh perusahaan.

- c. Bagi Akademik

Dapat untuk menjadikan sebagai pedoman untuk metode pengetahuan kepada mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis UPN Veteran Jakarta agar dapat mengetahui serta memahami terhadap tahapan prosedur pengajuan atas rincian biaya dalam perjalanan dinas.